

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah	Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan penerapan sistem informasi pajak daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah;	a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembiayaan serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sistem informasi pajak daerah serta dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah;

<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3); 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 16);
--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengertian Umum</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati Demak adalah Bupati Demak Demak. 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Demak 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati Demak adalah Bupati Demak. 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

<p>dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.</p> <p>13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan</p>	<p>langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.</p> <p>13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain</p>
---	---

<p>menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Demak.</p> <p>14. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.</p> <p>15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Demak untuk menerima setoran penerimaan Daerah.</p> <p>16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>17. Pemeriksaan adalah adalah seraian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>18. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, <i>eletronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), teleram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk anlog, digital elektromanignitik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem</p>	<p>ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Demak.</p> <p>14. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.</p> <p>15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Demak untuk menerima setoran penerimaan Daerah.</p> <p>16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>17. Pemeriksaan adalah adalah seraian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>18. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, <i>eletronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), teleram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromanignitik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem</p>
--	---

<p>elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.</p> <p>21. <i>Id-Billing</i> adalah sebuah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.</p> <p>22. Aplikasi Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh BPKPAD yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>23. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.</p> <p>24. <i>Cash Management System</i> yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.</p> <p>25. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem aplikasi yang terdiri dari sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik, target pajak daerah dan realisasi Pajak Daerah beserta laporannya.</p>	<p>elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.</p> <p>21. <i>Id-Billing</i> adalah sebuah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.</p> <p>22. Aplikasi Pajak <i>Online</i> adalah sistem elektronik yang disediakan oleh BPKPAD yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>23. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.</p> <p>24. <i>Cash Management System</i> yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.</p> <p>25. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem aplikasi yang terdiri dari sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik, target pajak daerah dan realisasi Pajak Daerah beserta laporannya.</p> <p>26. Hari adalah hari kalender.</p>
<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggaraan Sistem Online Pajak Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Sistem Online Pajak Daerah bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatnya kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah; c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah; d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dan Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (<i>realtime</i>); e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah; dan f. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah. 	
<p>Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem informasi pajak/daerah; b. hak dan kewajiban; c. larangan; dan d. sanksi. 	
<p>BAB II SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Wajib Pajak daerah melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah.</p> <p>(2) Sistem Informasi Pajak Daerah meliputi jenis Pajak Daerah yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; 	

<p>f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak parkir; h. pajak air tanah; i. pajak sarang wallet; j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.</p> <p>(3) Untuk mengakses Sistem Informasi Pajak Daerah, setiap Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak diberikan <i>Username</i> dan <i>Password</i> oleh BPKPAD.</p> <p>(4) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Sistem Informasi Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(5) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.</p> <p>(6) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(7) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(8) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui Sistem Informasi Pajak Daerah mendapatkan nomor bayar atau <i>Id-Billing</i> yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.</p> <p>(9) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nomor bayar atau <i>Id-Billing</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal Sistem Informasi Pajak Daerah tidak dapat digunakan, Wajib pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.</p>	

(2) Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB III SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pajak daerah, BPKPAD membangun Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.</p> <p>(2) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem perekam data transaksi usaha; dan b. sistem pelaporan <i>online</i>. <p>(3) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan online yang dipasang di BPKPAD.</p> <p>(4) Sistem pelaporan online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang diinstal di server BPKPAD untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak.</p> <p>(5) Kepala BPKPAD berwenang menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(6) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara <i>real time</i> yang dapat dipantau oleh BPKPAD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:</p>	

<p>a. Pajak Hotel Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar dan ruang pertemuan/Banquet; 2. Jasa pencucian (<i>Laundry</i>); 3. Telepon, <i>Faximile</i>, Internet; 4. <i>Business Centre</i>; 5. <i>Service charge</i>; 6. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain; 7. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan 8. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel. <p>b. Pajak Restoran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan makanan dan/atau minuman; 2. <i>Service charge</i>; 3. Pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (<i>room charge</i>); dan 4. Jasa boga/<i>catering</i>. <p>c. Pajak Hiburan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Room charge</i>; 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/<i>coin/minimum charge/cover charge/first drink charge</i> dan sejenisnya; 3. <i>Membership</i>/kartu anggota dan sejenisnya; dan 4. <i>Service charge</i>. <p>d. Pajak Parkir meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar; 2. Karcis berlangganan (<i>member</i>); dan 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir. <p>e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.</p> <p>(2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
---	--

<p>(3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan BPKPAD dalam hal perpajakan Daerah.</p> <p>(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.</p> <p>(5) Perubahan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPAD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sebelum dilakukan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, BPKPAD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.</p> <p>(2) BPKPAD dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.</p> <p>(3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/outlet di Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang dimiliki BPKPAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, BPKPAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat diterapkannya Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD untuk menambah atau mengurangi Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.</p>	

<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan sistem perekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPAD dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia sistem perekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan; b. menunda penambahan sistem perekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam; c. memberikan persetujuan pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan d. menolak pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada Kepala BPKPAD, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berhenti/dihentikan usahanya; atau b. pengalihan pengelolaan usaha. <p>(2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan memaksa (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKPAD kepada wajib pajak lain.</p>	

<p>(5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak, sistem perekam data transaksi usaha tetap terpasang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun; b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (<i>force majeure</i>). <p>(2) Keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.</p>	
<p>BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Pajak berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah; b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (<i>bill</i>), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan 	

<p>d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.</p> <p>(2) Wajib Pajak berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak; b. memberikan kemudahan kepada BPKPAD dalam melaksanakan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran; d. menyimpan data transaksi usaha berupa <i>bill</i> pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; e. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPKPAD; dan f. melaporkan dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam kepada BPKPAD apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) BPKPAD berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data transaksi usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; b. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; 	

<ul style="list-style-type: none"> d. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak; f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha. <p>(2) BPKPAD berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha dari wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membangun dan menyediakan jaringan; c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha; e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan f. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 	
<p>BAB V LARANGAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wajib Pajak dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang; b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPKPAD; c. mengubah data dan/atau perangkat dengan cara dan dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPKPAD; d. mengalihkan perangkat daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan BPKPAD; e. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPKPAD; dan/atau f. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPKPAD. 	<p>2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wajib Pajak dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang; b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPKPAD; c. mengubah data dan/atau perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPKPAD; d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPKPAD; e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.
<p>BAB VI SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan <i>omzet</i> melalui Sistem Informasi Pajak Daerah dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan. 	<p>3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan <i>omzet</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan. (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), dikenakan

	sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan maksimal selama 1 (satu) tahun.
	4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPKPAD.</p> <p>(2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.</p> <p>(3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPKPAD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15B</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPAD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">PASAL 15C</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak; dan c. penutupan tempat usaha.

	<p>(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPKPAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari; b. surat teguan kedua dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari; dan c. surat teguan ketiga dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari. <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(4) Dalam hal setelah pemasangan tanda persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKPAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>(5) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKPAD menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.</p> <p>(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	

Pasal 16 Ketentuan mengenai pelaksanaan/petunjuk teknis Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKPAD.	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak	
Ditetapkan di Demak pada tanggal 9 April 2021 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR	Ditetapkan di Demak pada tanggal 8 Mei 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 9 April 2021	Diundangkan di Demak pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 16	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 11